

**PENGARUH INVESTASI SWASTA, INVESTASI  
PUBLIK, DAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP)  
TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA  
PADA TAHUN 2011-2015  
(Studi pada Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa)**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh :**

**Hanif Prawita Indraswanti  
135020101111049**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2017**

**THE EFFECT OF PRIVATE INVESTMENT, PUBLIC  
INVESTMENT, AND PROVINCIAL MINIMUM WAGES  
ON THE EMPLOYMENT RATE DURING 2011-2015:  
A STUDY TOWARD PROVINCES IN JAVA ISLAND**

**MINOR THESIS**

**By:  
Hanif Prawita Indraswanti  
135020101111049**

**Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Attainment of the Degree of *Bachelor of Economics***



**DEPARTMENT OF ECONOMICS  
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS  
UNIVERSITY OF BRAWIJAYA  
MALANG  
2017**

**LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL**

Artikel Jurnal dengan judul :

**PENGARUH INVESTASI SWASTA, INVESTASI PUBLIK, DAN  
UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA  
PADA TAHUN 2011-2015  
(Studi pada Provisi-Provinsi di Pulau Jawa)**

Yang disusun oleh :

Nama : Hanif Prawita Indraswanti  
NIM : 135020101111049  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 02 Mei 2017

Malang, 02 Mei 2017

Dosen Pembimbing,



**Dr. Moh. Khusaini, SE., M.Si., MA.**

NIP. 19710111 199802 1 001

**PENGARUH INVESTASI SWASTA, INVESTASI PUBLIK, DAN  
UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA  
PADA TAHUN 2011-2015  
(Studi pada Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa)**

**Hanif Prawita Indraswanti, Moh. Khusaini**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya  
Email : [hanifprawita.hp@gmail.com](mailto:hanifprawita.hp@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu indikator dalam menentukan kesejahteraan masyarakat. Dengan tingginya penyerapan tenaga kerja akan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya melalui upah yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari investasi swasta, investasi publik, serta Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap penyerapan tenaga kerja pada tahun 2011-2015 di Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan data time-series dari tahun 2011-2015 dan data cross-section provinsi-provinsi di Pulau Jawa yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil investasi swasta di Pulau Jawa berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Sedangkan investasi publik di Pulau Jawa dan UMP di Pulau Jawa masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa.*

*Kata Kunci : Investasi swasta, investasi publik, UMP, penyerapan tenaga kerja.*

---

**A. PENDAHULUAN**

Dalam mengukur keberhasilan pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya banyak indikator yang dapat digunakan. Salah satunya adalah kemampuan daerah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan itu sendiri seperti ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang telah memasuki usia kerja. Menurut Mankiw, 1999 dalam Khusaini, 2006, pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran, dan perkembangan teknologi merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sehingga kemampuan suatu daerah dalam mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dirasa sangat penting demi membantu perekonomian daerah tersebut.

Seiring berjalannya waktu jumlah penduduk dalam suatu daerah tentu akan semakin meningkat. Dengan semakin bertambahnya penduduk dalam suatu daerah maka penyediaan lapangan pekerjaan juga harus terus dikembangkan untuk menyerap tenaga kerja dari penduduk yang telah semakin berkembang. Salah satu daerah yang terus mengalami perkembangan terutama dalam aspek kependudukannya adalah provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Dengan padatnya penduduk di Pulau Jawa, maka sudah jelas persaingan dalam mendapatkan pekerjaan di Pulau Jawa tentu sangat tinggi. Hal tersebut juga tergambar dari data sebagai berikut:

**Tabel 1 : Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja, 2011-2015**

Provinsi	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
DKI Jakarta	69.30	71.47	67.79	66.61	66.39
Jawa Barat	61.34	63.64	62.82	62.77	60.34
Jawa Tengah	70.15	71.26	70.43	69.68	67.86
Jawa Timur	68.06	69.60	69.78	68.12	67.84
Banten	65.61	65.17	63.55	63.84	62.24

Sumber: BPS, diolah

Dalam lima tahun terakhir, di semua provinsi yang ada di Pulau Jawa persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerjanya dapat dikatakan cukup besar. Dari data lima tahun terakhir, tidak ada yang berada di bawah 50%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk yang telah memasuki usia kerja merupakan angkatan kerja. Maka lebih dari separuh penduduk yang telah memasuki usia kerja membutuhkan lowongan kerja yang memadai untuk dapat menyerap tenaga kerja dengan banyak.

**Tabel 2 : Persentase Penduduk Bekerja Terhadap Angkatan Kerja, 2011-2015**

Provinsi	% Bekerja / AK				
	2011	2012	2013	2014	2015
DKI Jakarta	88.31	90.33	91.37	91.53	92.77
Jawa Barat	90.04	90.92	90.84	91.55	91.28
Jawa Tengah	92.93	94.39	93.99	94.32	95.01
D I Y	95.61	96.10	96.76	96.67	95.93
Jawa Timur	94.62	95.89	95.70	95.81	95.53
Banten	86.26	90.06	90.46	90.93	90.45

Sumber: BPS, diolah

Data di atas menunjukkan seberapa besar persentase penduduk yang telah bekerja terhadap keseluruhan jumlah angkatan kerja di Pulau Jawa. Dengan angka yang sangat tinggi, maka dapat diartikan jika dibandingkan dengan jumlah pengangguran yang ada di Pulau Jawa, jumlah orang yang telah bekerja masih jauh lebih besar. Hal tersebut menunjukkan penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa yang dapat dikatakan tinggi.

Menurut Sukirno (2000) dalam Sandika (2014), kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran. Sedangkan menurut Prasojo (2009) dalam Sandika (2014), adanya investasi-investasi akan mendorong terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran. Dengan demikian, investasi dirasa mampu untuk menjadi salah satu aspek yang dapat mendukung tingginya penyerapan tenaga kerja. Investasi yang dimaksud sendiri ada 2 yaitu investasi swasta (*private investment*) dan investasi publik (*public investment*). Di Pulau Jawa sendiri menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyumbangkan 54,4% dari keseluruhan jumlah investasi yang diterima oleh Indonesia.

Selain itu dalam rangka menjaga kesejahteraan para tenaga kerja, di Indonesia terdapat suatu standar yang biasa dikenal dengan upah minimum. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Dalam lingkup provinsi upah minimum biasa dikenal dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Tenaga kerja dengan upah merupakan dua aspek yang tidak bisa dipisahkan. UMP dibuat untuk menjaga tenaga kerja agar mendapatkan hak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya. Namun di lain sisi menurut Sholeh (2007), bila harga atau tingkat upah tenaga kerja naik, kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun. Dengan demikian, suatu hal yang dimaksudkan untuk menjaga hak para tenaga kerja di sisi lain dianggap dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja. Di Pulau Jawa, sama halnya dengan daerah lain sudah sewajarnya setiap tahun tingkat UMP akan terus meningkat demi mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.

Dengan melihat beberapa aspek tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pengaruh masing-masing aspek tersebut terhadap penyerapan tenaga kerja. Maka disini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Pengaruh Investasi Swasta, Investasi Publik, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Tahun 2011-2015 (Studi pada Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa)".

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### Tenaga Kerja

Istilah *employment* dalam bahasa Inggris berasal dari kata kerja *to employ* yang berarti menggunakan dalam suatu proses atau usaha memberikan pekerjaan atau sumber penghidupan. Jadi *employment* berarti keadaan orang yang sedang mempunyai pekerjaan (Sandika, 2014). Sedangkan menurut UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Sandika (2014), jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia.

### Investasi

Investasi menurut Vitalia (2014) merupakan pengeluaran atau pengeluaran penanam-penanam modal (perusahaan) untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama telah aus dan perlu didepresiasi (Sukirno, 2004 dalam Vitalia, 2014).

### Investasi Publik

Menurut Sobri (1999) dalam Vitalia (2014) Investasi Pemerintah (*Public Investment*) biasanya bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (nasional), seperti jalan raya, rumah sakit, pelabuhan, dan sebagainya. Investasi-investasi seperti ini sering disebut dengan *social overhead capital* (SOC). Melihat dari pengertian Investasi Publik tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Investasi Publik ini dapat diukur melalui besaran jumlah Belanja Modal dari Belanja Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD suatu daerah. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan, serta Belanja Modal Fisik Lainnya.

### Investasi Swasta

Menurut Royan (2015), investasi swasta (*private investment*) terdiri dari investasi swasta domestik (*domestic private investment*) dan investasi swasta asing (*foreign private investment*). Maka, Investasi Swasta di suatu daerah dapat dilihat melalui nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta Penanaman Modal Asing (PMA) dari daerah tersebut. Menurut UU RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

### Upah Minimum

Upah Minimum menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor:PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah Minimum terdiri dari:

1. UMR Tk.I adalah upah minimum yang berlaku di satu propinsi.
2. UMR Tk.II adalah upah minimum yang berlaku di daerah Kabupaten/Kotamadya atau menurut wilayah pembangunan ekonomi daerah atau karena kekhususan wilayah tertentu.
3. UMSR Tk.I adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di satu propinsi.

4. UMSR Tk.II adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah Kabupaten/Kotamadya atau menurut wilayah pembangunan ekonomi daerah atau karena kekhususan wilayah tertentu.

#### **Hubungan Investasi dengan Penyerapan Tenaga Kerja**

Teori Harrod-Domar dikenal dengan teori pertumbuhan. Menurut teori ini, investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi (Idris, 2016). Menurut Hukubun, 2015, Harrod-Domar berpendapat bahwa investasi memiliki pengaruh terhadap permintaan maupun penawaran. Dalam jangka panjang, investasi akan menyebabkan kenaikan stock modal seperti jalan, pabrik dan lain-lain. Di dalam suatu perekonomian, investasi memiliki peranan penting karena setiap tambahan investasi akan menyebabkan kenaikan jumlah output yang diproduksi. Dengan semakin membesarnya kapasitas produksi atau naiknya jumlah output yang diproduksi maka tenaga kerja akan semakin dibutuhkan. Meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja demi meningkatkan jumlah output yang mampu diproduksi, maka permintaan akan tenaga kerja dari produsen atau perusahaan akan semakin besar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa investasi mampu membuat banyak lowongan pekerjaan tersedia. Banyaknya lowongan pekerjaan tersebut menunjukkan tingginya penyerapan tenaga kerja.

#### **Hubungan Investasi Swasta dengan Penyerapan Tenaga Kerja**

Menurut UU RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu dari beberapa tujuan di atas adalah untuk menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, adanya Investasi Swasta atau penanaman modal dari swasta ini memang memiliki tujuan dari awal untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

#### **Hubungan Investasi Publik dengan Penyerapan Tenaga Kerja**

Investasi Pemerintah Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

1. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah,
2. meningkatkan pendapatan daerah,
3. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari pengertian serta fungsinya, dapat terlihat bahwa investasi yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat serta mendukung perkembangan perekonomian daerah. Jika perekonomian daerah dapat berkembang maka lapangan pekerjaan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dianggap akan tersedia. Menurut Sandika (2014), peranan pemerintah dalam suatu negara dapat dilihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi telekomunikasi, transportasi, persediaan air yang merupakan kontribusi utama pengeluaran pemerintah yang efisien untuk merangsang investasi sektor swasta. Pengeluaran pemerintah khususnya pengeluaran pembangunan yang mendorong investasi swasta dapat menciptakan lapangan usaha yang nantinya dapat meningkatkan kesempatan kerja.

#### **Hubungan UMP dengan Penyerapan Tenaga Kerja**

Menurut Sholeh (2007) permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Sehingga permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Permintaan tenaga kerja sangat bergantung dengan tingkat upah yang berlaku. Dengan demikian, tinggi rendahnya

penyerapan tenaga kerja juga sangat bergantung dengan tingkat upah yang berlaku. Menurut Maltus dalam Pangastuti, 2015, hubungan upah dengan penyerapan tenaga kerja memiliki dua sisi yaitu upah dapat menurunkan penyerapan tenaga kerja dan kenaikan upah juga dapat menaikkan penyerapan tenaga kerja.

### C. METODE PENELITIAN

#### Jenis Penelitian

Untuk menganalisis tentang pengaruh investasi swasta, investasi publik, dan UMP terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa akan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif.

#### Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di provinsi-provinsi di Pulau Jawa karena provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa dirasa mengalami perkembangan baik dari sisi ekonomi maupun jumlah kependudukan yang cukup besar.

#### Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja yaitu tingkat kemampuan lapangan pekerjaan dalam menyerap para tenaga kerja, dengan kata lain persentase perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan dan jumlah angkatan kerja di Pulau Jawa pada tahun 2011-2015. Untuk variabel independen dalam penelitian ini adalah Investasi Swasta yaitu jenis investasi yang dilakukan oleh swasta dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan (laba) di Pulau Jawa yang dapat dilihat dari nilai investasi PMDN serta PMA di provinsi-provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2011-2015, Investasi Publik yaitu jenis investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat dilihat dari belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2011-2015, serta UMP yaitu tingkat upah minimum yang telah ditetapkan di masing-masing provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2011-2015.

#### Data dan Cara Pengambilan Data

Dalam penelitian ini, digunakan data kuantitatif dengan sumber data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah data besaran nilai investasi PMA serta PMDN Pulau Jawa tahun 2011-2015 dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Besaran Belanja Modal dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang diperoleh dari data Realisasi APBD 2011-2015 dari Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) di Pulau Jawa 2011-2015 yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Jumlah penduduk Pulau Jawa yang bekerja dan jumlah angkatan kerja di Pulau Jawa di tahun 2011-2015 yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.

#### Model Analisis

Dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan model ekonometrika yaitu dengan alat analisis model regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut :

$$PTK_{it} = \alpha + \beta_1 IS_{it} + \beta_2 IP_{it} + \beta_3 UMP_{it} + e_i$$

Keterangan:

- PTK : Penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa
- IS : Investasi Swasta di Pulau Jawa
- IP : Investasi Publik di Pulau Jawa
- UMP : UMP di Pulau Jawa
- $\alpha$  : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien Regresi dari variabel yang digunakan
- $e_i$  : Variabel Pengganggu
- $i$  : individu sampel
- $t$  : waktu

### Pemilihan Model Estimasi

Menurut Yamin (2011) analisis regresi dengan data panel dapat dilakukan dalam beberapa langkah:

1. *Common Effect Model*  
Estimasi *common effect* ini dilakukan dengan hanya mengombinasikan data *time series* dan *cross section* dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Persamaan model ini menjadi:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{it} + e_{it}$$

2. *Fixed Effect Model* (FEM)  
Pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) memperhitungkan kemungkinan adanya masalah *omitted-variables* yang mungkin menyebabkan perubahan pada intersep *time series* atau *cross-section*. Dalam pendekatan FEM menambahkan variabel dummy untuk mengizinkan adanya perubahan intersep tersebut. Persamaan model ini menjadi:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{it} + \beta_2 d_{1i} + \beta_3 d_{2i} + \beta_4 d_{3i} + e_{it}$$

3. *Random Effect Model* (REM)  
Metode ini tidak menggunakan variabel *dummy* seperti halnya *fixed effect*, tetapi menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antarwaktu dan antarindividu. Model ini mengasumsikan bahwa setiap variabel mempunyai perbedaan intersep, tetapi intersep tersebut bersifat *random* atau stokastik. Persamaan model ini menjadi:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{it} + v_{it}$$

### Pemilihan Metode Estimasi

Dalam melakukan estimasi data panel menurut Yamin (2011) dapat dilakukan dengan pengujian model sebagai berikut:

1. Uji Chow  
Uji Chow dilakukan untuk menentukan model *common effect* atau model *Fixed Effect Model* (FEM) yang lebih tepat digunakan untuk mengestimasi data panel. Apabila hasil yang diterima:  
 $H_0$ : Model *common effect*  
 $H_1$ : Model *fixed effect*
2. Uji Hausman  
Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model *Random Effect Model* (REM) atau model *Fixed Effect Model* (FEM) yang lebih tepat digunakan untuk mengestimasi data panel. Apabila hasil yang diterima:  
 $H_0$ : Model *random effect*  
 $H_1$ : Model *fixed effect*
3. Uji Lagrange Multiplier  
Uji Lagrange Multiplier dilakukan untuk mengetahui apakah model *Random Effect Model* (REM) lebih baik dari model *common effect*. Apabila hasil yang diterima:  
 $H_0$ : Model *common effect*  
 $H_1$ : Model *random effect*

### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji apakah data yang ada telah mencapai asumsi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimation*) atau model yang telah terbebas dari pelanggaran asumsi klasik. Keempat uji yang akan dilakukan yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, serta uji heteroskedastisitas.

### Uji Statistik

Dalam melakukan estimasi dan menguji hipotesa dari data panel dilakukan melalui uji T (parsial), uji F (simultan), serta uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis data serta pengujian hipotesis di penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model regresi linier berganda guna menganalisis pengaruh dari investasi swasta, investasi publik, serta UMP terhadap penyerapan tenaga kerja. Analisis data ini dilakukan dengan bantuan program EViews 9 berdasarkan data-data besaran investasi swasta (PMDN dan PMA), investasi publik (Belanja Modal), UMP, serta penyerapan tenaga kerja (jumlah angkatan kerja yang bekerja) tahun 2011-2015 pada enam provinsi di Pulau Jawa yang diperoleh dari website resmi BPS. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menguji secara parsial maupun simultan.

Dalam menguji hipotesis di data panel, terlebih dahulu harus dilakukan pengujian untuk memilih model terbaik yang akan digunakan. Pengujian tersebut terdiri dari tiga cara yaitu Uji Chow dan Uji Hausman. Dari pengujian tersebut diperoleh model yang digunakan yaitu *Fixed Effect Model (FEM)*. Model persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$PTK = 1974.511 + 0,375540IS + 0,0000388IP + 0,000830UMP + ei$$

Model regresi tersebut berarti:

1. Nilai konstan PTK sebesar 1974,511. Hal ini berarti saat nilai investasi swasta, investasi publik, serta UMP sama dengan nol maka penyerapan tenaga kerja akan mengalami peningkatan sebesar 1974,511.
2. Probabilitas IS sebesar 0.0614 ( $0.0614 > 0,05$ ) dengan koefisien regresi dari IS sebesar 0,375540. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Investasi Swasta di Pulau Jawa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa.
3. Probabilitas IP sebesar 0.0024 ( $0.0024 < 0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa Investasi Publik di Pulau Jawa berpengaruh secara signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa. Koefisien regresi dari IP (Investasi Publik) sebesar 0,0000388. Hal ini berarti setiap ada peningkatan investasi publik sebesar 1% maka penyerapan tenaga kerja akan ikut meningkat pula sebesar 0,0000388% dengan anggapan bahwa variabel investasi swasta dan UMP adalah konstan.
4. Probabilitas UMP sebesar 0.0083 ( $0.0083 < 0.05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa berpengaruh secara signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa. Koefisien regresi dari UMP sebesar 0,000830. Hal ini berarti setiap ada peningkatan investasi swasta sebesar 1% maka penyerapan tenaga kerja akan ikut meningkat pula sebesar 0,000830% dengan anggapan bahwa variabel investasi publik dan investasi swasta adalah konstan.
5. Probabilitas [Prob (F-statistic)] sebesar 0.000051 ( $0.000051 < 0,05$ ). Dengan demikian, berarti bahwa Investasi Swasta, Investasi Publik, Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa berpengaruh secara signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa secara simultan.
6. *Adjusted R-squared* sebesar 0,666657. Dengan perolehan tersebut, maka berarti variabel IS, IP, dan UMP mampu menjelaskan variabel PTK sebesar 66,67% dengan error sebesar 33,33% ( $100\% - 66,67\% = 33,33\%$ ).

Selain itu, dari hasil olahan data di atas juga didapat hasil penyerapan tenaga kerja di masing-masing daerah. Dari data di atas terlihat bahwa koefisien dari DKI Jakarta sebesar 0,621160, Jawa Barat sebesar 2,640678, Jawa Tengah sebesar 2,020623, Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,112752, Jawa Timur sebesar 5,671717, Banten sebesar 1,518823. Dari perolehan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja tertinggi adalah pada Provinsi Jawa Timur diikuti dengan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

### Pembahasan Penelitian

Dari hasil analisis data di atas, diperoleh hasil bahwa Investasi Swasta di Pulau Jawa berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian dari Furqon (2014) dan Sandika (2014). Dalam penelitian Furqon (2014) menyatakan bahwa investasi secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di Kabupaten Gresik. Sedangkan dalam penelitian Sandika (2014) menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Pelalawan.

Telah diketahui sebelumnya bahwa Investasi Swasta terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Menurut Sandika (2014) negara-negara maju yang menanamkan modal di Indonesia memiliki faktor produksi yang padat modal, sehingga investasi yang mereka tanamkan di negara berkembang seperti Indonesia mengikuti teknik yang mereka kembangkan atau terapkan di negara asalnya yakni yang cenderung padat modal. Menurut Furqon (2014) sifat investasi padat modal cenderung mengakibatkan perusahaan berusaha mencari keuntungan maksimal dengan cara menekan biaya produksi salah satunya dengan cara mengganti sumber daya manusia dengan keberadaan teknologi canggih yang dinilai lebih efisien. Faktor ini yang membuat investasi swasta tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Teknik padat modal cenderung mengandalkan pada kemajuan teknologi. Sehingga, dengan tersedianya teknologi yang lebih canggih dan memadai, sedikit demi sedikit kebutuhan tenaga kerja akan berkurang. Menurut BKPM, di Pulau Jawa investasi swasta dalam bentuk padat modal yang masuk sebesar 88% sedangkan untuk padat karya hanya 12%.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Investasi Swasta tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja berarti bertentangan dengan Teori Harrod-Domar. Harrod-Domar dalam Hukubun (2015) berpendapat bahwa investasi memiliki pengaruh terhadap permintaan maupun penawaran. Dalam jangka panjang, investasi akan menyebabkan kenaikan stock modal seperti jalan, pabrik dan lain-lain. Di dalam suatu perekonomian, investasi memiliki peranan penting karena setiap tambahan investasi akan menyebabkan kenaikan jumlah output yang diproduksi. Dengan semakin membesarnya kapasitas produksi atau naiknya jumlah output yang diproduksi maka tenaga kerja akan semakin dibutuhkan. Meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja tersebut menunjukkan tingginya penyerapan tenaga kerja. Sedangkan, dalam penelitian ini Investasi Swasta justru tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Selanjutnya untuk Investasi Publik berdasarkan hasil analisis data di atas, diperoleh hasil bahwa Investasi Publik di Pulau Jawa berpengaruh signifikan secara positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Hasil dari penelitian ini serupa dengan penelitian dari Fatihudin (2012). Hasil dari penelitian tersebut adalah perubahan belanja modal pemerintah Surabaya, Kediri, Sidoarjo, Gresik memiliki kontribusi pula terhadap pengurangan nilai tambah ekonomi dan penurunan penyerapan tenaga kerja di empat kab/kota *high economic* Jawa Timur. Dalam penelitian tersebut berarti menunjukkan bahwa belanja modal memiliki hubungan yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah di suatu daerah tentu akan berpengaruh pada masyarakat di suatu daerah tersebut pula. Dengan tujuan utama dari setiap kegiatan pemerintah yang memang diutamakan untuk masyarakat maka pengaruh tentu akan secara langsung dirasa oleh masyarakat. Terlebih pada kegiatan semacam investasi seperti ini. Dengan adanya investasi pemerintah atau yang dapat digambarkan melalui Belanja Modal pemerintah maka hal tersebut merefleksikan pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam memfasilitasi maupun membantu membangkitkan perekonomian masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan tujuan dari Investasi Pemerintah Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, yaitu:

1. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah,
2. meningkatkan pendapatan daerah,
3. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa Investasi Publik berpengaruh signifikan secara positif maka hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan dari Investasi Publik di atas. Investasi Pemerintah Daerah memiliki tujuan meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian daerah. Jika perekonomian di daerah terus meningkat dan berkembang akibat semakin meningkatnya investasi dari pemerintah sendiri maka hal tersebut dapat membuat iklim ekonomi di daerah tersebut semakin baik. Dengan semakin membaiknya iklim ekonomi pada suatu daerah maka hal tersebut akan memberi efek positif pada usaha-usaha yang ada di daerah tersebut. Usaha-usaha yang ada pada suatu daerah tersebut akan turut berkembang seiring dengan perekonomian daerah tersebut yang semakin membaik. Perkembangan pada usaha tersebut pada akhirnya tentu akan meningkatkan permintaan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang semakin meningkat akibat tingkat produksi yang meningkat pula. Maka, penyerapan tenaga kerja akan semakin besar pula dengan semakin tingginya permintaan akan tenaga kerja.

Selanjutnya untuk UMP berdasarkan hasil analisis data di atas, diperoleh hasil bahwa UMP di Pulau Jawa berpengaruh signifikan secara positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Malthus. Menurut Malthus dalam Pangastuti (2015), hubungan upah dengan penyerapan tenaga kerja memiliki dua sisi yaitu upah dapat menurunkan penyerapan tenaga kerja dan kenaikan upah juga dapat menaikkan penyerapan tenaga kerja. Dalam kasus ini, kenaikan upah juga dapat menaikkan penyerapan tenaga kerja. Hasil dari penelitian ini juga serupa dengan penelitian Cahyadi (2014) dan Pangastuti (2015). Kedua penelitian ini juga memperoleh hasil bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Menurut Budiawan (2012), upah yang terus meningkat akan membawa dampak positif pada penyerapan tenaga kerja karena dengan adanya peningkatan upah tersebut para pengusaha akan berupaya untuk meningkatkan atau menambah jumlah unit usahanya sehingga dengan adanya penambahan unit usaha secara otomatis akan menambah jumlah tenaga kerja pula. Selain itu, menurut Budiawan (2012), dengan jumlah upah yang semakin meningkat diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dari para karyawan di suatu perusahaan sehingga perusahaan akan mampu untuk semakin mengembangkan usahanya. Menurut teori Pasar Kompetitif dalam Pratomo, 2011, jika upah minimum terus meningkat hingga berada di atas tingkat keseimbangan upah maka akan terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja. Kelebihan penawaran tenaga kerja ini yang dapat menyebabkan meningkatnya pengangguran pula. Sehingga, upah yang terus meningkat sewajarnya masih berada di bawah dari tingkat keseimbangan upah untuk menghindari adanya penurunan penyerapan tenaga kerja. Menurut *International Labour Organization* (ILO) mayoritas provinsi yang ada di Pulau Jawa tingkat pertumbuhan upah minimumnya berada di bawah rata-rata nasional. Tingkat pertumbuhan upah minimum rata-rata Nasional secara riil adalah 6,5%, untuk DKI Jakarta sebesar 12%, Jawa Barat sebesar 4%, Jawa Tengah sebesar 4%, DIY sebesar 1,5%, Jawa Timur sebesar 7%, dan Banten sebesar 2%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat upah minimum di keempat provinsi di Pulau Jawa kecuali DKI Jakarta dan Jawa Timur masih berada di bawah dari keseimbangan upah di Indonesia. Sehingga, dengan meningkatnya upah minimum di Pulau Jawa tidak membuat penurunan permintaan tenaga kerja.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Investasi Swasta di Pulau Jawa berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa. Hal tersebut berarti saat terjadi peningkatan maupun penurunan Investasi Swasta di Pulau Jawa tidak akan berpengaruh terhadap peningkatan maupun penurunan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa.
2. Investasi Publik di Pulau Jawa berpengaruh positif secara signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa. Hal tersebut berarti saat terjadi peningkatan Investasi Publik di Pulau Jawa akan berpengaruh terhadap peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa.
3. Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa berpengaruh positif secara signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa. Hal tersebut berarti saat terjadi peningkatan Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa akan berpengaruh terhadap peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa.

### Saran

Dari hasil penelitian serta pembahasan di atas, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Investasi Swasta di Indonesia terutama di Pulau Jawa dapat dikatakan cukup tinggi. Banyak investasi yang masuk baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun pada umumnya banyak investasi-investasi yang berbentuk padat modal sehingga kebutuhan tenaga kerja akan mulai tergeser dengan keberadaan teknologi yang dirasa lebih efektif. Maka, untuk mendorong penyerapan tenaga kerja yang lebih besar lagi, disarankan pemerintah mampu untuk mendorong investasi pada sektor-sektor yang berbentuk padat karya. Sehingga kedepannya, dengan banyaknya investasi swasta yang masuk akan turut mendukung semakin tingginya penyerapan tenaga kerja.
2. Investasi Publik atau yang dapat dilihat dari Belanja Modal masing-masing provinsi di Pulau Jawa berdasarkan hasil penelitian berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Maka, disarankan pemerintah dapat terus mengoptimalkan dari penggunaan Belanja Modal tersebut. Dengan semakin meningkatnya investasi dari

pemerintah daerah sendiri diharapkan akan terus membantu dalam mendukung perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Selain itu, tidak menutup kemungkinan investasi dari pemerintah akan membantu untuk menarik minat dari para investor swasta baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri.

3. Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa berdasarkan hasil penelitian berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut memiliki makna saat upah meningkat penyerapan tenaga kerja juga ikut meningkat. Dengan kondisi tersebut, maka pemerintah disarankan untuk terus memperhatikan dan mengawasi penetapan maupun pemberian upah dari masing-masing perusahaan. Dalam penetapan untuk kedepannya, pemerintah sebaiknya terus memperhatikan kebutuhan dari para pekerja. Sehingga, perkembangan upah akan mengikuti perkembangan kebutuhan dari para pekerja. Dengan demikian, pekerja atau tenaga kerja akan mampu untuk memenuhi kebutuhannya dengan upah yang diterima. Dalam pemberlakuan upah minimum, pemerintah juga harus terus mengawasi apakah pemberian upah untuk para pekerja di tiap perusahaan telah memenuhi standard upah minimum yang telah ditetapkan sebelumnya. Jangan sampai terdapat perusahaan yang melanggar peraturan upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga tetap harus memperhatikan perusahaan-perusahaan yang tidak mampu memberikan upah sesuai dengan standard upah minimum. Hal tersebut bisa dilakukan melalui pengawasan secara tepat terhadap perusahaan-perusahaan yang mengajukan penangguhan dalam pembayaran upah minimum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. <https://www.pusdiklat.bkpm.go.id/asset/media/UUNo25Tahun2007 TtgPM.pdf> diakses tanggal 30 Januari 2017.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 2016. Lampau Target, Realisasi Investasi 2015 Rp 545,4 T. [http://www2.bkpm.go.id/images/uploads/file\\_siaran\\_pers/Press\\_Release\\_-\\_IND\\_-\\_TW\\_IV\\_2015.pdf](http://www2.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Press_Release_-_IND_-_TW_IV_2015.pdf) diakses tanggal 30 Januari 2017.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2008-2016. <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1907> diakses tanggal 30 Januari 2017.
- Budiawan, Amin. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil Pengolahan Ikan di Kabupaten Demak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Cahyadi, Luh Diah Citraresmi. 2014. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Industri Kreatif di Kota Denpasar. *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.
- Fatihudin, Didin. 2012. Kontribusi Private Investment dan Belanja Modal Pemerintah Terhadap Nilai Tambah Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Kab/Kota High Economic di Provinsi Jawa Timur (Kota Surabaya, Kota Kediri, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik). *Jurnal Akuntansi*. 4(1). 90-104.
- Furqon, Ahmad Mujahidul. 2014. Analisis Pengaruh PDRB, Upah Minimum, Jumlah Unit Usaha dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur di Kabupaten Gresik Tahun 1998-2012. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Hukubun, Mefi, Debby Rotinsulu, Audie Niode. 2015. Pengaruh Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Tenaga Kerja Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2002-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 15(1).
- Idris, Amiruddin. 2016. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta:Deepublish.
- International Labour Organization (ILO). 2015. Tren Tenaga Kerja dan Sosial di Indonesia 2014-2015. [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_381565.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_381565.pdf) diakses tanggal 6 Mei 2017.
- Kementerian Dalam Negeri. 2012. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. [http://kemendagri.go.id/produk-hukum/2012/09/04/pedoman\\_-\\_pengelolaan-investasi-pemerintah-daerah](http://kemendagri.go.id/produk-hukum/2012/09/04/pedoman_-_pengelolaan-investasi-pemerintah-daerah) diakses tanggal 30 Januari 2017.
- Kementerian Ketenagakerjaan. 1999. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor:PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum. Jakarta. <http://betterwork.org/in/wp/G-PERMOMT1999-01-Tentang-Upah-Minimum-LG.pdf> diakses tanggal 30 Januari 2017.
- Kementerian Perindustrian. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. [https://www.kemenperin.go.id/kompetensi/UU\\_13\\_2003.pdf](https://www.kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf) diakses tanggal 30 Januari 2017.
- Khusaini, Mohammad. 2006. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang:BPFE Universitas Brawijaya.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). 2016. Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan. <http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art16.pdf> diakses tanggal 18 Januari 2016.
- Pangastuti, Yulia. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012. *Economics Development Analysis Journal*. 4(2). 224-234.
- Pratomo, Devanto Shasta, Putu Mahardika Adi Saputra. 2011. Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonomian yang Berkeadilan: Tinjauan UUD 1945. *Journal of Indonesian Applied Economics*. 5(2). 269-285.
- Royan, Mohammad Miftahur, Aisah Jumiaty, Fajar Wahyu Prianto. 2015. Pengaruh Investasi Publik dan Swasta Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur. *Artikel Ilmiah*. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Sandika, Rudi Sofia, Yusni Maulida, Denny Setiawan. 2014. Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Pelalawan. *JOM FEKON*. 1(2).

- Sholeh, Maimun. 2007. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Upah:Teori Serta Beberapa Potretnya di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. 4(1). 62-75.
- Vitalia, Devi Rizky. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Semarang.*Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Yamin, Sofyan, Lien Auliya Rachmach, Heri Kurniawan. 2011. *Regresi dan Korelasi dalam Genggaman Anda:Aplikasi dengan Software SPSS, Eviews, MINITAB, dan STATGRAPHICS*. Jakarta:Salemba Empat.